

kiprah agroforestri

World Agroforestry Centre (ICRAF) Indonesia

Volume 7 No. 3 - Desember 2014

daftar isi



- 3 Kontribusi World Agroforestry Centre dalam penyusunan Standar Nasional Indonesia
- 4 Kalau sudah dapat izin hutan desa, *So What?*
- 6 Berlatih LUMENS untuk perencanaan penggunaan lahan menuju pembangunan hijau di Provinsi Jambi
- 8 Membentuk unit kerja multipihak untuk pembangunan rendah emisi dan hutan desa 3 kabupaten di Provinsi Jambi
- 9 Penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menyusun aturan lokal untuk menyongsong pengelolaan hutan desa
- 11 Hutan Adat: Pilihan pengelolaan hutan tersisa bagi masyarakat Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak
- 12 Siap memanfaatkan hutan desa
- 13 Seminar Nasional Agroforestry ke-5
- 14 Bagaimana memastikan bahwa kita memiliki cukup pangan
- 15 Budidaya Sengon membawa keberuntungan

Perhutanan sosial sudah digagas sejak tahun 1980an di Indonesia. Namun hingga saat ini, pengembangan perhutanan sosial seperti hutan desa (HD) dan hutan kemasyarakatan (HKM) sangat lambat. Target yang dicanangkan Kementerian Kehutanan sampai 2014 adalah untuk HKM seluas dua juta hektar dan HD seluas 500.000 ha. Dari target tersebut, sampai Mei 2014 untuk HKM hanya tercapai seluas 80.834 ha sedangkan untuk HD seluas 67.737 ha. Untuk proses perizinan kedua skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini sudah tersebar di 23 provinsi di Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perhutanan sosial mampu meningkatkan sumber penghidupan masyarakat, menjaga keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan lainnya, dan bahkan memberikan kepastian hak pengelolaan hutan bagi masyarakat. Meskipun demikian, berbagai kendala dihadapi oleh masyarakat untuk mendapatkan izin pengelolaan tersebut, sehingga perhutanan sosial belum tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan pembelajaran proses berkenaan dengan tantangan dan hambatan dalam mengembangkan perhutanan sosial khususnya hutan desa.

KIPRAH edisi khusus ini, menyajikan beragam artikel yang menjabarkan proses dan kegiatan dalam mengembangkan hutan desa di Provinsi Jambi. ICRAF dan WARSU mendapatkan hibah dari Margareth A. Cargill Foundation (MACF) untuk mengembangkan dan memperkuat 13 hutan desa di lima kabupaten di Jambi. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam edisi ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat pengembangan hutan desa, bagaimana proses penguatan tersebut dilakukan serta tantangan dan hambatan yang perlu diatasi.

Akhir kata, penulis berharap artikel ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan dan penguatan perhutanan sosial di Indonesia.

Gamma Galudra



Petani mengangkut pupuk (foto: Noviana Khususiyah)

kiprah agroforestri

Redaksional

Kontributor

Subekti Rahayu, Degi Harja, Putra Agung, Andree Ekadinata,
Reny Juita, Sonya Dewi, Rachman Pasha, Herma Yulis,
Ilesnawati, Nopri Hidayat, Sukmaren, Enggar Paramita,
Tikah Atikah, M. Sanjiva Refi Hasibuan

Editor

Subekti Rahayu, Reny Juita, Gamma Galudra

Desain dan Tata Letak
Riky Mulya Hilmansyah

Foto Sampul
Noviana Khususiyah



World Agroforestry Centre

ICRAF Southeast Asia Regional Program
Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia
☎ 0251 8625415; fax: 0251 8625416
✉ icraf-indonesia@cgiar.org
blog.worldagroforestry.org
http://www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia

Agroforestri adalah sistem pemanfaatan lahan yang memadukan pohon dengan tanaman lain dan/atau ternak

Kami mengajak pembaca untuk berbagi cerita dan pendapat mengenai agroforestri. Silahkan kirim naskah tulisan (500-1000 kata) disertai foto beresolusi besar. Saran dan kritik juga dapat ditulis di dalam blog KIPRAH di <http://kiprahagroforestri.blogspot.com>

Kontribusi World Agroforestry Centre dalam penyusunan Standar Nasional Indonesia

Oleh: Subekti Rahayu dan Degi Harja

World Agroforestry Centre (ICRAF) merupakan lembaga penelitian internasional yang tidak hanya melakukan penelitian di bidang agroforestry tetapi juga banyak terlibat dalam penelitian mengenai perubahan iklim dan jasa lingkungan. Berbagai perangkat penilaian terkait lingkungan telah dikembangkan oleh ICRAF dan menjadi rujukan berbagai lembaga penelitian dan mahasiswa mulai dari skala nasional hingga internasional.

Dalam bidang jasa lingkungan keanekaragaman hayati, ICRAF berkontribusi dalam penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Metode Penilaian Jasa

Lingkungan Keanekaragaman Hayati yang disusun oleh Pusat Standarisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan. Pada awal tahun 2014 ini, metode tersebut telah dikeluarkan secara resmi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai SNI 8014:2014.

Selain SNI 8014:2014, ICRAF sebelumnya juga telah berkontribusi dalam penyusunan SNI 7724:2011 tentang Pengukuran dan perhitungan cadangan karbon – pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan, serta penyusunan SNI 7497:2008 tentang Penanganan benih dan bibit cendana.

Penilaian jasa lingkungan keanekaragaman hayati dan implementasinya

Penilaian jasa lingkungan keanekaragaman hayati dalam SNI 8014:2014 mencakup tiga tingkat kerincian (tier), yaitu tier 1 menggunakan indikator berupa ekosistem penting yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, tier 2 menggunakan indikator keterancaman, kelangkaan, perubahan keragaman spesies pada suatu ekosistem dan tier 3 menggunakan indikator yang lebih rinci lagi.

Pada tier 3, indikator keragaman hayati dibagi menjadi enam bagian dengan rincian sebagai berikut:

1. Keragaman genetik spesies
2. Populasi satwa spesies kunci
3. Karakter fungsional spesies
 - a. Sebaran berat jenis kayu
 - b. Sebaran tipe pemencar biji
 - c. Sebaran tipe penyerbuk
4. Komposisi komunitas spesies
 - a. Keragaman alpha (α) diversity
 - b. Keragaman beta (β) diversity
 - c. Keragaman gamma (γ) diversity
5. Struktur hutan
 - a. Basal area
 - b. Kerapatan populasi
 - c. Peninggi (rata-rata tinggi 10 pohon tertinggi dalam luasan 1 ha)
5. Fungsi ekosistem
 - a. Jasa penyediaan barang (*provisioning*)
 - b. Jasa pengaturan ekosistem (*regulating*)
 - c. Jasa budaya (*cultural*)

Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada dokumen SNI 8014:2014 yang dapat diunduh dari website BSN (<http://bsn.or.id>).

Badan Standarisasi Nasional

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Sumber: <http://bsn.or.id>

Pusat Standarisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Pusat Standarisasi dan Lingkungan (Pustanling) merupakan salah satu pusat di Kementerian Kehutanan yang berada di bawah Sekretariat Jenderal. Pustanling mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan standarisasi, sertifikasi, pengelolaan dan evaluasi dampak lingkungan, serta penanganan perubahan iklim di bidang kehutanan. Pustanling menyelenggarakan fungsi untuk:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang standarisasi produk, jasa lingkungan, serta pengelolaan, evaluasi dampak lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan,
2. Pelaksanaan tugas di bidang standarisasi produk, jasa lingkungan, serta pengelolaan, evaluasi dampak lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan,
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang standarisasi produk, jasa lingkungan, serta pengelolaan, evaluasi dampak lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan.

Sumber: http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO_III01/II_III01.htm

ICRAF saat ini sedang mengembangkan metode monitoring dan evaluasi jasa lingkungan keanekaragaman hayati bersama masyarakat dengan mengacu pada tier 3 SNI 8014:2014 ini. Metode monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari pengembangan metode perencanaan penggunaan lahan dalam kerangka kerja pembangunan rendah emisi. Metode ini untuk selanjutnya akan diuji-cobakan dalam monitoring keanekaragaman hayati di tiga kabupaten di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Merangin dan Bungo.

Pelatihan untuk uji-coba metode monitoring dan evaluasi keanekaragaman hayati ini telah dilakukan untuk pertama kalinya

pada bulan April 2014 di Kabupaten Batanghari dan Bungo. Peserta uji-coba monitoring keanekaragaman hayati adalah masyarakat dari sembilan desa yang masing-masing memiliki Hutan Desa di wilayahnya, yaitu Desa Jelutih, Hajran dan Olak Besar di Kabupaten Batanghari. Untuk Kabupaten Bungo, diikuti oleh Desa Senamat Ulu, Laman Panjang, Sungai Telang, dan Buat. Sementara untuk Kabupaten Merangin, peserta berasal dari Desa Beringin Tinggi dan Jangkat.

Dalam uji-coba pertama ini dapat dilihat bahwa masyarakat mampu melakukan monitoring keanekaragaman hayati di kawasan Hutan Desa di wilayah mereka dengan menggunakan indikator jenis-jenis tumbuhan



Foto: Degi Harja

berkayu (pohon). Masyarakat dapat mengidentifikasi keanekaragaman jenis pohon tingkat lahan (keanekaragaman alpha), karakter fungsional jenis (tingkat kekerasan kayu) dan fungsi dari tiap-tiap jenis dalam ekosistem.

Kalau sudah dapat izin hutan desa, *So What?* Pentingnya rencana pengelolaan hutan desa yang baik

Oleh: Putra Agung

"Apo lagi nak kami buek habih dapek izin dari Pak Mentri? Batang kayu tegak di rimbo masih ado, rencanonyo tu sebagian kecil nak kami tumbang nan sebagi lagi nak kami biakkan tegaklah, madu lum biso kami ambek macem tu jugo rotan samo hasil rimbo lainyo. Apo lagi nak harus kami buek? Katonyo wajib buek rencano dulu? Rencano nan macemano? Kagek salah kami..."

Pertanyaan ini sering kali muncul pada setiap diskusi mengenai Hutan Desa (HD) dengan masyarakat pengelola HD. Kebingungan baru muncul pasca kebingungan sebelumnya mengenai status wilayah kelola mereka terselesaikan dengan diberikannya izin HD oleh Menteri Kehutanan.

Pengelolaan HD mensyaratkan adanya penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) sebelum aktifitas dimulai pada wilayah yang diberikan izin. RKHD merupakan rencana umum jangka panjang, yaitu selama masa berlakunya izin, dalam hal ini 35 tahun, yang menjadi acuan pengelolaan.

Dalam menyusun RKHD, banyak hal yang patut dipertimbangkan oleh pemegang izin HD. Proses penyusunan yang partisipatif mutlak diperlukan guna menjamin legitimasi rencana pengelolaan. Lebih jauh lagi, RKHD harus dapat menjamin tercapainya tujuan pengelolaan yang meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Sesuai dengan mandat peraturan perundangan, selayaknya pengelola HD mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari berbagai pihak terkait dalam proses penyusunan dokumen RKHD, terutama dari Dinas Kehutanan setempat, serta pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di Provinsi Jambi, sebagaimana kita ketahui bersama, pendampingan HD banyak dilakukan oleh LSM. Jambi menjadi kawah candradimuka dalam melahirkan izin-izin HD melalui pendampingan berbagai LSM lokal,



Foto: M. Sofiyuddin



Foto: M. Sofiyuddin

nasional maupun internasional. Oleh karena itu sudah selayaknya jika LSM memainkan perannya selain sebagai pendamping juga ikut dalam memfasilitasi penyusunan RKHD yang partisipatif bersama-sama dengan masyarakat.

Dokumen RKHD yang baik akan mampu menjawab tantangan pengelolaan HD oleh masyarakat. Bagi masyarakat awam menyusun dokumen RKHD yang disyaratkan dengan berbagai macam ketentuan penyusunan bukanlah hal yang mudah. Peran serta pihak pendamping mutlak dibutuhkan. Transfer ilmu dari pihak pendamping ke pihak masyarakat pengelola HD mutlak harus dilakukan. Sebaiknya pendamping HD harus bisa menciptakan kemandirian bagi masyarakat dalam mengelola areal mereka dengan partisipatif dan professional, sehingga masyarakat dapat berswadaya dan berswakelola dengan baik.

Pemberian izin HD oleh negara kepada masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat dengan berbagai praktek pengelolaan lokal yang mereka miliki. Namun dalam pengelolaan hutan ada hal-hal yang tetap diatur oleh negara, salah satunya adalah mensyaratkan penyusunan RKHD yang wajib diselesaikan oleh pemegang izin paling lambat satu tahun setelah diberikannya izin kepada masyarakat.

HD bisa dipandang sebagai suatu unit kelola pelestarian daya dukung hutan dan alam, disamping juga dapat dipandang sebagai bentuk suatu unit kelola bisnis masyarakat berdasarkan praktek kelola lokal. Unit kelola pelestarian dan unit kelola bisnis sebaiknya tidak dipisahkan dari rencana kelola suatu konsesi HD. Konsesi HD yang berada pada kawasan hutan dengan fungsi lindung misalnya, HD sebagai unit kelola pelestarian hutan akan lebih mendominasi rencana kelola kawasan yang tertuang dalam RKHD, namun tidak menutup kemungkinan adanya upaya kelola bisnis melalui ekstraksi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sama halnya dengan HD yang berada pada kawasan hutan dengan fungsi produksi, ekstraksi kayu sebesar 50 m³ pertahun yang izin ekstraksinya melekat pada izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dapat dilakukan, walaupun pemberian izin ekstraksi ini hanya sebatas untuk pemanfaatan komunal desa. Pemanfaatan kayu dan HHBK pada HD yang berada pada fungsi kawasan hutan produksi dapat dilakukan dan dijadikan sebagai rencana kelola bisnis HD, tetapi perlu digarisbawahi bahwa ekstraksi hasil hutan yang dilakukan harus tetap dapat menjamin kelestarian baik itu kelestarian sumberdaya hutan itu sendiri maupun kelestarian hasil yang didapat.

Rencana tata kelola hutan pada konsesi HD harus tergambar dengan baik di dalam RKHD. Tanpa adanya rencana tata kelola hutan yang baik, niscaya tujuan diberikannya HD kepada masyarakat sulit dapat dicapai. Oleh negara, pemberian izin HD merupakan langkah nyata dalam pengakuan hak kelola kawasan hutan negara. Dalam hal ini negara melihat bahwa masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengelola kawasan hutan negara seperti halnya pihak swasta. Membuat rencana tata kelola hutan seharusnya dimulai dari proses inventarisasi potensi yang dimiliki oleh konsesi HD. Oleh karena itu bekal ilmu perencanaan hutan yang baik harus mampu ditularkan oleh para pendamping HD kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan pemberian izin HD dapat dicapai. Hal yang paling penting adalah dengan diberikannya konsesi HD kepada masyarakat dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat pengelola HD itu sendiri dengan pengelolaan hutan yang bijak dan berkelanjutan.

Berlatih **LUMENS** untuk perencanaan penggunaan lahan menuju pembangunan hijau di Provinsi Jambi

Oleh: Andree Ekadinata, Reny Juita, dan Sonya Dewi

Proses perencanaan penggunaan lahan secara berkelanjutan di Indonesia pada umumnya masih menghadapi berbagai kendala. Akar masalah yang menjadi faktor penghambat antara lain: keterbatasan perangkat praktis yang tersedia dan kapasitas teknis dalam perencanaan penggunaan lahan. Oleh karena itu pengembangan perangkat yang praktis dan kapasitas teknis perlu dilakukan.

LUMENS (*Land use planning for multiple environmental services*), dan perangkat pendahulunya LUWES (*Land use planning for low emission development strategy*) adalah sebuah kerangka kerja perencanaan penggunaan lahan yang berbasis perangkat lunak komputer, mudah digunakan, praktis dan dapat diakses oleh khalayak luas. Perangkat lunak **LUMENS** dirancang untuk mengakomodir terjadinya proses negosiasi penggunaan lahan di tingkat lansekap yang inklusif, integratif dan berbasiskan informasi serta analisa yang shahih. **LUMENS** secara khusus dikembangkan untuk memberdayakan negosiasi multipihak dalam perencanaan bentang lahan berkelanjutan yang mendukung upaya pembangunan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat dan pada saat yang sama juga memelihara dan memulihkan jasa lingkungan.

Pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan, diskusi dan lokakarya, merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka kerja **LUMENS**. Sesuai dengan namanya, rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan para pemangku kepentingan dalam melakukan perencanaan penggunaan lahan. Pemahaman, pengetahuan dan kemampuan yang dimaksud disini bukan hanya dalam bentuk penggunaan perangkat lunak saja, tetapi juga meliputi penguasaan terhadap konsep dasar, aspek-aspek penting, permasalahan dan tantangan dalam melakukan perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

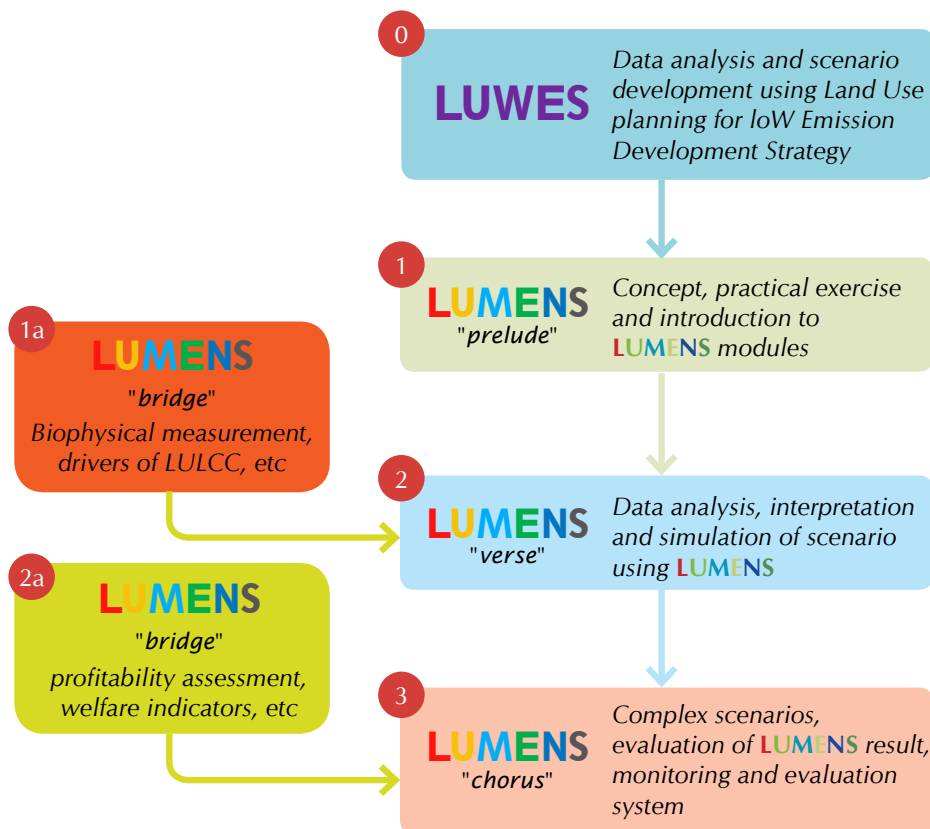
Proyek Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui Perbaikan Pengelolaan Hutan Masyarakat dan Agroforestri yang didanai oleh Margaret A. Cargill

Foundation (MACF) di tiga kabupaten di Jambi, yaitu Kabupaten Batang Hari, Bungo dan Merangin bertujuan untuk membangun, pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat dan sistem agroforestri dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan lainnya, kualitas habitat penyangga, hak atas lahan dan meningkatkan mata pencaharian atau penghidupan masyarakat. **LUMENS** adalah salah satu perangkat lunak yang dikembangkan dalam proyek ini dan digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan perangkat **LUMENS** melibatkan para pihak pemerintah di setiap kabupaten dan juga merupakan bagian dari pengembangan kapasitas di tingkat kabupaten.

Pengembangan kapasitas untuk penggunaan perangkat **LUMENS** dilakukan dalam bentuk rangkaian



Pelatihan LUMENS II di Provinsi Jambi diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Kab. Merangin, Batanghari, dan Bungo (foto: Reny Juita)



Tahapan proses pengembangan kapasitas LUMENS: *prelude*, *verse*, *chorus* dan *bridges*

pelatihan yang meliputi pelatihan ruang kelas, kegiatan lapangan, penelitian bersama, diskusi dan lokakarya. Terinspirasi dari struktur musik yang harmoni, proses penguatan kapasitas LUMENS dibagi ke dalam empat bagian, yaitu: *prelude*, *verse*, *chorus* dan *bridge*.

1. LUMENS "prelude" adalah bagian pertama dari rangkaian LUMENS Capacity Building (Pengembangan Kapasitas). Tahapan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, teori dan proses perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan dalam bentuk praktis. Dalam tahapan ini peserta kegiatan juga diperkenalkan dengan perangkat lunak LUMENS dan data yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Pada akhir tahapan ini, peserta diharapkan dapat menyusun rencana tindak lanjut untuk kegiatan pengembangan kapasitas berikutnya.
2. LUMENS "verse" adalah tahapan kedua dari rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas LUMENS. Pada tahapan ini, peserta kegiatan

- diperkenalkan secara rinci tentang modul-modul di dalam LUMENS beserta proses pemasukan data, analisa data, interpretasi hasil dan pembangunan skenario serta opsi perencanaan penggunaan lahan. Pada tahapan ini peserta diharapkan dapat menggunakan keseluruhan modul-modul LUMENS secara baik dan benar.
3. LUMENS "chorus", merupakan bagian ketiga yang dilakukan berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan oleh peserta kegiatan setelah tahapan kedua selesai. Tahapan ini merupakan iterasi sekaligus proses konsultasi dalam membangun skenario dan opsi perencanaan penggunaan lahan dengan menggunakan data sebenarnya. Pada akhir rangkaian kegiatan tahapan ini, peserta kegiatan diharapkan dapat menampilkan dan menyampaikan hasil analisa yang dilakukannya kepada pemangku kepentingan yang lebih luas.
 4. LUMENS "bridge" adalah tahapan penghubung antara LUMENS "verse" dan LUMENS "chorus". Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta

pelatihan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan LUMENS. Pada tahapan ini kegiatan dilakukan melalui pelatihan, pengukuran lapang, bekerja bersama dan diskusi antara peserta pelatihan dengan narasumber LUMENS.

Peserta pelatihan LUMENS adalah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Kelompok pemerintah:** Dinas/ Kementrian yang terkait dengan perencanaan penggunaan lahan di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, misalnya: Bappeda, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan dan Energi, Transmigrasi, Pekerjaan Umum, Perhubungan dan lain-lain.
2. **Lembaga swadaya masyarakat atau lembaga nirlaba** lainnya yang memiliki kepedulian terhadap perencanaan penggunaan lahan secara berkelanjutan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.
3. **Perwakilan masyarakat dan komunitas lokal** di tingkat kabupaten maupun provinsi, yang terkait di dalam proses perencanaan penggunaan lahan.
4. **Swasta atau kalangan usaha** yang memiliki kegiatan usaha pada bidang berbasis lahan dan memiliki kepentingan serta kepedulian terhadap perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan.

Pelatihan LUMENS sampai pada tahun kedua proyek telah dilakukan sampai dengan tahap kedua dari empat pelatihan yang direncanakan. Pelatihan pertama diikuti oleh 22 orang peserta yang terdiri dari staf pemerintahan daerah baik tingkat Provinsi Jambi maupun Kabupaten Batang Hari, Bungo dan Merangin, diantaranya adalah staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Pertambangan. Demikian pula untuk pelatihan kedua.

Pelatihan LUMENS ketiga direncanakan pada Bulan Februari 2015 yang akan diikuti oleh lebih luas para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan secara lebih luas di tingkat Provinsi Jambi.

Membentuk unit kerja multipihak untuk pembangunan rendah emisi dan hutan desa 3 kabupaten di Provinsi Jambi

Oleh: Rachman Pasha



Unit Kerja LUMENS dan Hutan Desa Kab.Merangin sedang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh ICRAF



Posisi Unit Kerja Hutan Desa/LUWES/LUMENS pada POKJA RAD-GRK Kabupaten

Suasana pelatihan hari terakhir siang itu berjalan serius sambil sesekali diselengi oleh gelak dan tawa dari para peserta yang hadir. Tak terlihat ekspresi kelelahan ataupun bosan dari raut wajah setiap orang yang ada. Hari itu, tanggal 6 Juni 2014 bertempat di salah satu hotel di kawasan Dago, Kota Bandung yang merupakan hari terakhir dari rangkaian lima hari lokakarya dan pelatihan Perhitungan *Reference Emission Level* (REL) untuk menyusun Rencana Aksi Daerah dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari sektor berbasis lahan yang terintegrasi pada tingkat provinsi dan kabupaten bagi segenap perwakilan pemerintah daerah dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Pelatihan kali itu terasa berbeda dengan pelatihan-pelatihan serupa sebelumnya yang pernah dilakukan. Pelatihan *Land use planning for multiple environmental services* (LUMENS) kali ini juga merupakan titik awal pembentukan unit kerja teknis Hutan Desa dan LUMENS bagi tiga kabupaten dalam implementasi proyek Margaret A. Cargill Foundation (MACF),

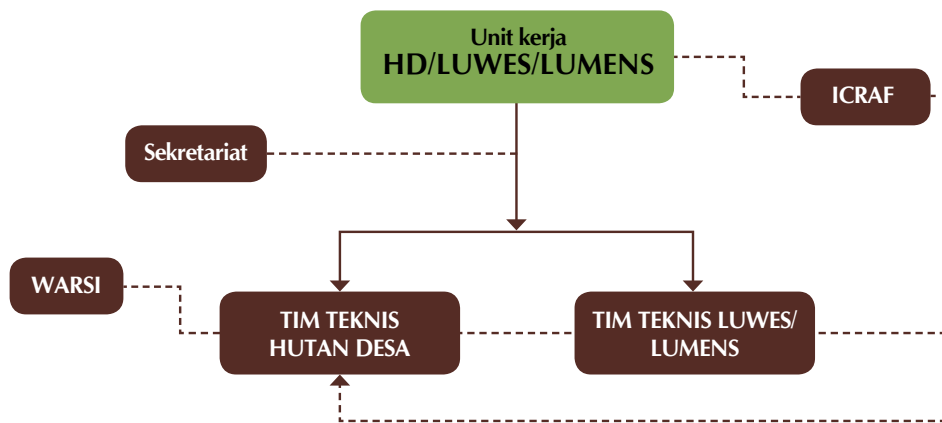
yaitu Merangin, Batang Hari dan Muara Bungo.

Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang peneliti ICRAF yang banyak menekuni isu di bidang hutan desa dan tata kelola lahan dan hutan, Putra Agung menuturkan bahwa salah satu kunci sukses terhadap inisiatif pembangunan rendah emisi dan hutan desa di tingkat lokal ditentukan oleh keberadaan dan kesiapan kelembagaan daerah dalam mendukung dan memfasilitasi berbagai proses yang ada. Berangkat dari pernyataan tersebut, muncullah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau kelembagaan yang mampu mengkoordinasikan para pihak di daerah untuk memfasilitasi dan mempercepat proses penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) serta mempersiapkan dokumen strategi pembangunan rendah emisi kabupaten secara partisipatif.

Pembentukan unit kerja ini pada dasarnya adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dari tiga kabupaten yang dikoordinasi oleh Badan Pembangunan dan

Perencanaan Daerah (BAPPEDA) dengan World Agroforestry Centre (ICRAF) untuk merumuskan usulan kebijakan tata guna lahan dan hutan serta untuk memfasilitasi kemitraan para pihak dalam mendukung aksi mitigasi daerah melalui implementasi hutan desa guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, efisien dan berkelanjutan. Unit kerja yang dimaksud adalah suatu unit kerja yang merupakan bagian dari kelompok kerja (POKJA) RAD-GRK berbasis lahan di kabupaten yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan setempat. Oleh karena itu, anggota unit kerja ini juga merupakan individu yang sama dengan anggota POKJA-RAD walaupun tidak menutup kemungkinan diisi oleh personil lain guna memperkuat analisa dan POKJA-RAD GRK itu sendiri.

"Hal yang paling penting adalah anggota unit kerja tersebut diharapkan paham tentang tahapan implementasi hutan desa dan konsep aksi penurunan emisi dari sektor berbasis lahan berikut dengan kebijakan-kebijakan nasional-daerah yang mendukung implementasi kedua isu tersebut" tutur Agung lagi.



Bagan unit kerja yang merupakan bagian dari POKJA-RAD GRK berbasis lahan



Andri Yuzhar

Sekretaris Dinas Kehutanan Batanghari, Andri Yuzhar S.Hut menyatakan “keberadaan unit kerja ini akan membantu pemerintah

kabupaten dalam memberikan rekomendasi tentang pilihan-pilihan strategi dan skenario dalam melakukan implementasi pembangunan rendah

emisi kabupaten sekaligus mendorong dan mempercepat proses Hutan Desa yang ada saat ini sebagai bagian dari salah satu bentuk aksi mitigasi dari sektor kehutanan yang melibatkan partisipasi masyarakat”. Lebih jauh lagi Andri menjelaskan bahwa “unit kerja ini terdiri dari 5-10 orang yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis lahan dan terbagi ke dalam dua unit teknis, yaitu: tim teknis LUMENS dan tim teknis Hutan Desa. Dalam pelaksanaannya, unit kerja ini

didampingi oleh ICRAF dan WARSII sebagai mitra kunci yang memiliki kapasitas dalam hal pembangunan rendah emisi dan Hutan Desa”.

Dengan berbekal kapasitas teknis yang matang, ke depannya POKJA ini diharapkan mampu menyediakan berbagai dokumen dan data informasi yang dibutuhkan terkait dengan aktifitas penggunaan lahan untuk mendorong terciptanya pengelolaan lahan dan hutan yang lebih baik bagi tiap-tiap kabupaten contoh. “Lahirnya unit kerja ini diharapkan dapat menjadi katalisator berkembangnya pemikiran mengenai pembangunan rendah emisi khususnya pada kegiatan berbasis lahan dan mengawal proses penguatan Hutan Desa yang saat ini sedang berjalan. POKJA juga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan kapasitas para anggota, berbagi pengetahuan, penggalan data dan informasi serta forum-forum diskusi yang berguna untuk membantu proses kegiatan pembangunan di tiga kabupaten model” tutup Agung mengakhiri diskusi kopi kami sore itu.

Penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menyusun aturan lokal untuk menyongsong pengelolaan hutan desa

Oleh: Herma Yulis*

Konsep otonomi daerah memberikan harapan baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa. Konsep ini tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Revisi kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999. Perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan perbaikan di berbagai sektor. Mulai dari peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, pemerataan pembangunan, keistimewaan daerah, serta terbukanya



Peserta simulasi penyusunan lokalatih peraturan desa (foto: KKI WARSII)

peluang pembuatan peraturan dengan memasukkan aturan lokal di setiap daerah.

Dominasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada birokrat diganti dengan hukum yang lebih demokratis yang penyusunannya melibatkan masyarakat. Bukan lagi perancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat elitis, tertutup dan kurang mengakomodir partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat lokal harus mengacu pada payung hukum yang sudah ada, yaitu aturan nasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan peraturan daerah.

Peraturan desa (Perdes) merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat lokal, yaitu desa yang relatif dikenal masyarakat meskipun belum begitu populer, karena kurangnya pemahaman dalam proses penyusunan sampai pada implementasi. Peluang untuk mengefektifkan kembali penyusunan Perdes semakin terbuka pasca lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa). Kebijakan ini memberi peluang bagi pemerintah desa dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan hutan di wilayah administrasi desa, aparatur pemerintah dan masyarakat desa serta lembaga yang diberi hak kelola merupakan pemangku kepentingan yang harus berpartisipasi aktif dalam

memahami aturan tersebut, bahkan dalam penyusunannya. Partisipasi aktif dari seluruh elemen pemangku kepentingan ini merupakan bagian dari proses untuk tercapainya pelestarian sumberdaya hutan yang kolaboratif di desa tersebut, bahkan antar desa yang secara ekologi saling berhubungan.

Penguatan jaringan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan dan terlibat dalam pengelolaan hutan demi keberlangsungan pengelolaan hutan yang lestari perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyusun aturan lokal desa, memahami aturan yang ada dan memantau aturan tersebut ketika diimplementasikan.

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI) bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Kabupaten Sarolangun dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari memfasilitasi penguatan peran dan fungsi aparatur pemerintah desa dalam pembuatan aturan lokal di desa dan membangun jaringan pemantauan pengelolaan sumberdaya hutan di dua kabupaten tersebut melalui kegiatan lokalatih. Lokalatih dengan topik “Penyusunan Aturan Lokal dan Membangun Jejaring Pemantauan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Secara Partisipatif dan Berkelanjutan” dilakukan pada 20-22 Agustus 2014, di Auditorium Hotel King, Kabupaten Sarolangun yang bertujuan untuk memfasilitasi aparatur pemerintah desa dalam memahami Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Melalui lokalatih ini diharapkan mereka bisa menyerap

aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dan pertimbangan dalam merumuskan perundang-undangan yang sinkron dan harmonis. Kegiatan ini melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pengelola Hutan Desa dan Kelompok Pengelola Hutan Adat.

Pasca lokalatih, peserta dari dua kabupaten ini memiliki dua isu besar yang akan dikerjakan. Peserta dari Kabupaten Batanghari akan mendorong agar izin pengelolaan kawasan hutan desa oleh masyarakat desa segera direalisasikan. Sementara, untuk Kabupaten Sarolangun aparat desa dan lembaga yang telah dibentuk sepakat bersama-sama mengawal dokumen usulan hutan desa yang masih terhenti di tingkat kabupaten. Masing-masing desa juga akan mengadakan pertemuan di tingkat desa untuk melihat kembali dan merevisi Perdes, kemudian membentuk Perdes baru sesuai dengan alur pembuatan aturan-aturan lokal yang baik.

Selain memfasilitasi penguatan peran dan fungsi aparatur desa, KKI WARSI juga akan melakukan pendampingan untuk memonitor pelaksanaan dan realisasi rencana tindak lanjut yang telah disusun di masing-masing kabupaten. Baik pendampingan dalam bentuk pertemuan-pertemuan ataupun koordinasi dengan para pihak guna merealisasikan tujuan yang disepakati oleh masyarakat dari dua kabupaten tersebut.

* Komunitas Konservasi Indonesia WARSI
Kontak: Adi Junedi (ggiriak@gmail.com)

Bina suasana lokalatih lokalatih peraturan desa (foto: KKI WARSI)





Foto: KKI WARS

Hutan Adat: Pilihan pengelolaan hutan tersisa bagi masyarakat Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak

Oleh: Ilesnawati* dan Nopri Hidayat*

Talang Kemuning dan Bintang Marak, dua desa yang berada di Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci telah mengajukan hak kelola hutan adat kepada bupati. Bagi masyarakat desa penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), hutan memiliki arti dan fungsi penting dalam menunjang kehidupan mereka. Dasar pemilihan bentuk kelola berupa hutan adat yang diajukan masyarakat kedua desa ini adalah hasil dari kajian mengenai “Studi Persepsi Masyarakat terhadap Kawasan Hutan dan Kearifan Adat dalam Mempertahankan Kawasan Hutan di Desa Talang Kemuning dan Desa Bintang Marak”, yang dilakukan WARS I pada Bulan Juni Tahun 2014. Studi dilakukan dengan metode survey rumah tangga dengan 30 responden masing-masing desa.

Hasil studi menunjukkan bahwa 80% responden memiliki persepsi tinggi terhadap hutan, mereka memandang hutan tidak hanya dari fungsi ekonomi dan sosial, tetapi juga fungsi ekologis. 10% responden memiliki persepsi sedang, mereka memandang hutan dari fungsi ekonomi, dan memahami keberlangsungan hidup mereka dari sumberdaya hutan, tetapi belum menyadari hutan perlu dikelola secara berkelanjutan, sedangkan 10% responden memiliki persepsi rendah, mereka tidak mengetahui manfaat hutan dan memahami ketergantungan mereka terhadap hutan.

Karakteristik masyarakat Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak

Mata pencaharian utama hampir semua warga dua desa ini adalah petani sawah dan ladang. Sawah ditanami padi unggul dua kali setahun. Tanaman semusim seperti cabe, tomat, kacang merah dan beberapa jenis sayuran mereka budidayakan pula untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara untuk tabungan mereka menanam kayu manis (*Cinnamomum verum*, sin. *C. zeylanicum*).

Pola pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di kedua desa mencerminkan kepiawaian mereka dalam mengelola sumber daya alam sebagai penunjang kehidupan hingga anak cucu kelak. Pemanfaatan lahan dilakukan dengan baik yang didasarkan pada pengalaman masa lalu yang menjadi kearifan masyarakat, misalnya tidak membuka lahan pada daerah rawan longsor, hulu air, dan sepadan sungai.

Pemanfaatan hutan tersisa berbasis nilai-nilai adat

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KKI WARS I pada bulan Maret - April 2014 menunjukan bahwa di Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak masih terdapat kawasan hutan tersisa yang berada di luar kawasan TNKS. Kawasan hutan tersisa tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) dan Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luasan mencapai \pm 760 Hektar. Namun hingga saat ini kawasan hutan tersebut belum dikelola oleh masyarakat secara langsung. Masyarakat belum memiliki pandangan mengenai skema pemanfaatannya. Oleh karena itu, maka kajian mengenai persepsi masyarakat dalam pengelolaan hutan dilakukan di Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak untuk mendapatkan gambaran tentang skema pemanfaatan hutan yang diharapkan oleh masyarakat.

Hasil kajian memperoleh gambaran bahwa masyarakat memilih hutan adat sebagai skema pengelolaan hutan tersisa. Alasan mereka memilih skema hutan adat karena melalui skema ini masyarakat masih dapat memegang nilai-nilai adat dalam mengelola hutan,

misalnya adanya larangan pembukaan lahan pada rawan longsor, aturan pengelolaan hulu air, dan aturan terkait sempadan sungai. Selain itu, nilai-nilai adat tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ritual-ritual adat, budaya pergaulan, pernikahan dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Apalagi kedua desa ini berada dalam satu kesatuan adat, karena sebelumnya merupakan satu desa yang dimekarkan.

Setelah menentukan pilihan skema pengelolaan hutan tersisa, maka pada Bulan Oktober 2014 masyarakat kedua desa mengajukan legalitas hak kelola hutan adat kepada Bupati Kerinci. Masyarakat menyampaikan berbagai bukti bahwa mereka telah lama mengelola hutan secara arif dan lestari dengan menggunakan aturan adat yang menjadi tradisi turun-temurun, antara lain adanya hutan lindung adat pada kawasan hulu air dan masih berlangsungnya ritual-ritual adat terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan ini mampu menjaga kelestarian kawasan hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi dan ekologi. Pengajuan ini juga didukung oleh aturan-aturan yang tertuang dalam Kesepakatan Konservasi Desa, seperti menjaga kawasan konservasi TNKS, adanya kawasan lindung adat, melindungi sempadan sungai dan hulu sungai.

Kawasan yang diajukan untuk dikelola dengan skema hutan adat ini adalah kawasan hutan Bukit Sungai Kering, Bukit Seruk dan Bukit Rawa Sijang. Ketiga kawasan ini dianggap sangat penting bagi masyarakat, karena selain sebagai kawasan penyangga TNKS, juga memiliki fungsi penting sebagai kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Grao Sikai dan Batang Jujun. Dengan terjaganya kawasan hulu DAS diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi kedua desa, yaitu terjaganya sumber air sebagai penopang kehidupan, mengurangi resiko terjadinya bencana longsor dan kekeringan.

Setelah pengajuan hak pengelolaan hutan adat pada hutan yang tersisa di ketiga kawasan hutan tersebut, saat ini masyarakat masih menunggu dan sangat mengharapkan tanggapan dari pemerintah.

* Komunitas Konservasi Indonesia WARS I
Kontak: Adi Junedi (ggiriak@gmail.com)

Siap memanfaatkan hutan desa

Oleh: Sukmareni*



Gubernur Jambi menyerahkan HPHD pada Bupati Merangin dan Bupati Batanghari (foto: KKI WARSI)

Jambi merupakan provinsi yang telah mendapatkan hak kelola hutan desa terbanyak di Indonesia. Hingga Agustus 2014, sudah 28 desa yang mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa dari Menteri Kehutanan, dengan total areal kelola \pm 66.671 hektar, yang tersebar di Kabupaten Bungo, Merangin, Batanghari dan Tanjung Jabung Timur. Dari 28 desa yang telah mendapat PAK Hutan Desa tersebut, enam diantaranya telah disetujui Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD)-nya oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Artinya, enam desa tersebut tinggal selangkah lagi untuk dapat memanfaatkan hutan desanya, yaitu menyusun Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan di masing-masing kabupaten.

Sementara, desa-desa yang belum mendapatkan persetujuan harus melalui proses perizinan agar dapat memanfaatkan potensi hutan desanya. Tahapan dalam proses perizinan tersebut adalah: (1) Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) harus mengajukan perizinan, yaitu Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD PPT) Provinsi Jambi; kemudian (2) menyusun Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi; selanjutnya (3) menurunkan RKHD dalam bentuk

Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan di masing-masing kabupaten.

Jalan panjang dalam perizinan pemanfaatan hutan desa

Memperoleh legalisasi ini secara tuntas bukanlah persoalan mudah bagi KPHD. Berbagai hambatan dihadapi, salah satunya adalah ketidak-pahaman masyarakat dalam penyusunan usulan HPHD dan RKHD. Melalui dukungan proyek MargaretA. Cargill Foundation (MACF), Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI) telah memfasilitasi dan mendorong percepatan pengakuan hak kelola masyarakat Desa Senamat Ulu, Sungai Mengkuang Laman Panjang, Sangi Letung dan Sungai Telang, Kabupaten Bungo; Desa Jangkat dan Beringin Tinggi, Kabupaten Merangin serta Jelutih, Hajran dan Olak Besar, Kabupaten Batanghari. KKI WARSI fokus memfasilitasi sembilan KPHD tersebut dalam menyusun usulan HPHD dan RKHD. Di sisi lain, KKI WARSI juga melakukan upaya komunikasi dan advokasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendorong percepatan penerbitan HPHD dan pengesahan RKHD.

KKI WARSI telah berhasil mendorong diterbitkannya sembilan HPHD dari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Provinsi Jambi. Proses

ini termasuk cepat, meskipun agak tersendat ketika pengurusan HPHD Sungai Telang. Menurut telaah teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Bungo, ditemukan kesalahan koordinat peta pada lampiran PAK hutan desa yang tidak sesuai dengan lokasi di lapangan. Namun Bupati Bungo tetap melanjutkan proses ini kepada Gubernur Jambi dalam hal ini Dishut Provinsi Jambi. Sewaktu melakukan verifikasi, Dishut Provinsi Jambi melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) yang memang memiliki kewenangan untuk pemetaan. Ketika persoalan kesalahan ini diketahui, BIPHUT segera berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIII Pangkal Pinang. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, ternyata tidak ditemukan kesalahan fatal, hanya berupa kesalahan penulisan koordinat. Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan fakta lapangan, maka HPHD Sungai Telang akhirnya ditandatangani.

Setelah mendapatkan HPHD, KPHD menyusun dan mengusulkan pengesahan RKHD. Tujuh KPHD, yaitu: Senamat Ulu, Sungai Mengkuang Laman Panjang, Jangkat, Beringin Tinggi, Jelutih, Hajran dan Olak Besar telah mengusulkan pengesahan RKHD kepada Kepala Dishut Provinsi Jambi. Setelah melakukan telaah teknis, Kepala Dishut Provinsi Jambi menyetujui enam RKHD, tetapi RKHD Olak Besar belum bisa disetujui karena Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Direktur Jendral tentang hutan desa dalam proses revisi. Kepala Dishut Provinsi Jambi berjanji akan melakukan telaah lebih lanjut setelah peraturan tersebut disahkan. Sementara itu, KPHD Sangi Letung Buat masih menyusun RKHD dan KPHD, Sungai Telang baru berencana menyusun RKHD karena HPHD mereka baru diterbitkan.

Proses penyusunan dokumen ini dilakukan melalui musyawarah KPHD yang selanjutnya dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Peran Dishut Provinsi Jambi sangat membantu dalam memberikan bimbingan teknis penyempurnaan RKHD berdasarkan

telaah yang telah dilakukan. Dishut Provinsi Jambi sudah empat kali melakukan bimbingan teknis kepada KPHD yaitu Desa Senamat Ulu, Sungai Mengkuang Laman Panjang dan Hajran. Tak hanya itu Dishutbun Kabupaten Bungo juga turut melakukan sosialisasi RKHD kepada KPHD Senamat Ulu.

Dalam meningkatkan kapasitas KPHD, KKI WARSI telah menyelenggarakan pelatihan penyusunan rencana kerja, pelatihan manajemen kelembagaan dan pelatihan penyusunan peraturan desa yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada KPHD terkait

dengan penyusunan rencana kerja, pengelolaan lembaga KPHD dan penyusunan peraturan desa. Melalui pelatihan tersebut diharapkan pengurus KPHD memiliki kapasitas dalam menyusun rencana kerja, menjalankan roda organisasi dan menyusun peraturan desa terkait pengelolaan hutan desa. Pelatihan telah dilakukan di Desa Senamat Ulu, Sungai Mengkuang Laman Panjang, Sangi Letung Buat, Lubuk Beringin, Sungai Telang, Beringin Tinggi Jangkat, Hajran, Jelutih dan Olak Besar.

Berdasarkan uraian di atas, pemanfaatan hutan desa memerlukan dokumen yang lengkap dan kapasitas yang memadai agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan sebagai pengelolanya dan terpeliharanya jasa lingkungan yang ada, yaitu berupa keanekaragaman hayati, fungsi tata air dan serapan karbon, sehingga memberikan manfaat secara berkelanjutan.

* Komunitas Konservasi Indonesia WARSI
Kontak: Adi Junedi (ggiriak@gmail.com)

Seminar Nasional Agroforestry ke-5

Oleh Tim ICRAF

Seminar Nasional Agroforestri kelima diadakan di Ambon, Provinsi Maluku pada 20-21 November 2014, dengan Universitas Pattimura selaku tuan rumah dalam seminar ini. Sekitar 120 peserta hadir dalam acara ini, terdiri dari peneliti senior dan junior pada berbagai lembaga penelitian antara lain: Balai Penelitian Teknologi Agroforestri - Ciamis, Masyarakat Agroforestri Indonesia, Pusat Penelitian Dipterocarpa, Balai Penelitian Kehutanan Makasar, Pusat Penelitian Kebijakan Kehutanan, Balai Penelitian Teknologi Pangan Maluku dan Sulawesi; institusi penelitian internasional, ICRAF dan CIFOR; LSM (Operation Wallace Trust); para staff pengajar senior dan junior serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yaitu Gadjah Mada, Pattimura, Sumatera Utara, Lambung Mangkurat, Institut Pertanian Bogor, Darussalam Ambon, Brawijaya, Padjajaran, Hasanuddin dan Lampung. Kegiatan hari pertama adalah: (1) penanaman pohon di dalam lingkungan kampus Universitas Pattimura. Sekitar 300 pohon yang terdiri dari durian,

mangga, serta spesies asli Atung (*Parinari curatellifolia*) ditanam dalam acara ini; (2) pameran produk agroforestri dan (3) kunjungan lapang ke Desa Hutumuri yang masyarakatnya menerapkan sistem agroforestri kompleks dengan pala, cengkeh dan durian sebagai komoditas utama. Pak Poli, petani agroforestri di Desa Hutumuri, menjelaskan bahwa sistem agroforestri adalah yang paling cocok untuk daerah ini dimana topografi yang berbukit-bukit dan sangat penting untuk menjaga sumber daya air. Selain itu, Pak Poli dapat memanen produk terus menerus sepanjang tahun dari berbagai jenis pohon. Tidak ada pupuk dan pestisida dipakai pada lahannya, hanya di waktu luang dia memotong gulma secara manual saja.

Rangkaian presentasi dilakukan di hari kedua, yang sebelumnya dibuka oleh Gubernur Maluku Ir. Said Assegaf. Gubernur sepenuhnya setuju dan mendukung agroforestri, khususnya di Provinsi Maluku di mana wilayah ini terdiri dari pulau-pulau kecil yang cenderung rentan terhadap perubahan iklim. Sesi pertama pada hari kedua adalah seri presentasi oleh pembicara kunci: Dr. Ujjwal Pradhan (Koordinator Regional World Agroforestry Centre), Dr. Ir. Bambang Trihartono, MF. (Penelitian dan Pengembangan Badan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Ir. MAS Latuconsina, MT (Wakil Bupati Ambon) dan Prof. Dr. Ir. R. Oszaer, MS (Guru Besar Universitas Pattimura).

Dr. Pradhan menjelaskan tentang aktifitas dan hasil penelitian yang saat ini dilakukan oleh ICRAF Asia Tenggara di beberapa lokasi



Pemberian cenderamata dari ICRAF yang diserahkan oleh Dr. Ujjwal Pradhan (kanan) kepada Gubernur Maluku Ir. Said Assegaf (kiri), saat acara pembukaan Seminar Nasional Agroforestri. (foto: Endri Martini)

penelitian. Dr. Trihartono berbicara tentang Balai Penelitian Teknologi Agroforestri (BPTA) sebagai lembaga riset baru di bawah FORDA yang sudah meluncurkan Strategi Nasional Penelitian Agroforestri hingga 2030. Bapak Latuconsina berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis Hutan Kota di Ambon yang tentunya terintegrasi dengan program penanaman pohon, dan pembicara kunci terakhir, Prof. Oszaer, menyampaikan mengenai peran agroforestri sebagai sistem pengelolaan lahan terbaik pada pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim.



TIM ICRAF saat acara penanaman pohon di area kampus Universitas Pattimura, Ambon

Rangkaian presentasi oleh berbagai presenter dilakukan pada sesi kedua. Sejumlah 91 artikel disajikan selama sesi ini yang dibagi dalam lima kelompok, yaitu: (1) sistem agroforestri di pulau-pulau kecil dan benua; (2) agroforestri: strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; (3) Infestasi pada lanskap agroforestri untuk multiproduk dan jasa; (4) aspek kearifan sosial-budaya, ekonomi dan lokal dan (5) pendidikan dan kebijakan pengembangan agroforestri.

Pada kelompok sistem agroforestri di pulau-pulau kecil dan benua, para peneliti dari Universitas Pattimura, BPTA-Ciamis dan ICRAF menyajikan 13 makalah pilihan untuk meningkatkan praktek-praktek agroforestri di pulau-pulau kecil dan benua. Beberapa masalah yang dibahas dalam kelompok ini antara lain:

1. Adanya pengetahuan lokal dan kebijakan nasional dalam

pengelolaan hutan Sagu (*Metroxylon sagu* Rottb.), potensi pemanfaatan sagu sebagai spesies prioritas lokal di Maluku

2. Pengelolaan dan penggunaan tanah dari berbagai bio-aktivator untuk meningkatkan kesuburan tanah
3. Tumpangsari kayu (Sengon - *Albizia chinensis*) dan rimpang (rizoma) dan tanaman tahunan
4. Situasi sekarang tentang hama dan penyakit yang menyerang Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) dan Pala (*Myristica fragrans*) di Maluku dan implikasinya terhadap praktek Agroforestri
5. Memahami pertumbuhan diameter jenis kayu dalam kaitannya dengan kualitas produksi kayu rakyat

Selain presentasi makalah secara oral, 29 poster dan 10 foto terbaik dari lomba foto bertema agroforestri yang diselenggarakan pada Bulan

Oktober juga disajikan selama acara berlangsung. Lomba Foto Agroforestri yang diselenggarakan oleh ICRAF ini dibuka untuk umum dan merupakan bagian dari cara penyebaran informasi mengenai agroforestri dalam bentuk media fotografi. Masyarakat cukup antusias menyambut acara ini yang ditunjukkan oleh banyaknya peserta lomba. Sejumlah 93 foto yang sebagian besar berasal dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia diterima oleh panitia untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Tiga orang tim penilai dari lembaga yang berbeda dan salah satu diantaranya adalah seorang fotografer profesional untuk alam dan satwa liar diundang dalam proses penilaian untuk mendapatkan juara pertama dan kedua, sedangkan juara favorit ditetapkan berdasarkan penilaian menggunakan media sosial Facebook.

Bagaimana memastikan bahwa kita memiliki cukup pangan

Oleh Enggar Paramita, diterjemahkan oleh Tikah Atikah

Dunia semakin peduli terhadap pertumbuhan populasi dengan menyediakan pangan yang cukup dalam menghadapi perubahan iklim. Agroforestry dapat menjadi kunci untuk memenuhi tantangan tersebut.

World Agroforestry Centre (ICRAF) berkesempatan ikut serta dalam AID Forum Food Security Summit: Asia 2014 di Jakarta, 8–9 Oktober 2014. Saat acara pembukaan Dr. James Roshetko mengemukakan bahwa

agroforestri adalah pilihan yang layak untuk memenuhi banyak aspek tantangan untuk mengamankan pasokan pangan.

Dalam sistem agroforestri, terdapat berbagai spesies tanaman dan melalui proses alami pohon-pohon tersebut beradaptasi dengan perubahan iklim: pepohonan yang mampu beradaptasi akan lebih mampu bertahan terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, dengan spesies yang lebih beragam, campuran tanaman pangan setahun dan tahunan dengan berbagai jenis pohon, karbon yang tersimpan akan lebih banyak.

Menurut Dr. Roshetko, “petani agroforestry relatif tidak rentan terhadap perubahan bila dibandingkan dengan petani yang bergantung pada tanaman monokultur yang sering tidak mempunyai modal, sehingga gagal

panen dapat menyulitkan mereka. Namun, dengan spesies yang beragam petani memiliki alternatif sumber pendapatan sepanjang tahun,” katanya.

Membangun kapasitas petani untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim adalah hal penting lainnya. Melalui metode partisipatif yang telah diterapkan di proyek Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi, petani dan masyarakat dibantu untuk beradaptasi terhadap kerentanan yang disebabkan oleh perubahan iklim, dan dengan meningkatkan pengetahuan mereka, masyarakat setempat dapat mengembangkan strategi untuk mengelola ancaman.

Artikel lengkapnya dapat dilihat disini: <http://blog.worldagroforestry.org/index.php/2014/10/15/how-to-make-sure-we-have-enough-to-eat/>

Budidaya Sengon membawa keberuntungan

Oleh: Tikah Atikah dan M. Sanjiva Refi Hasibuan

Seorang mahasiswa pascasarjana program studi Arsitektur Lanskap tidak mengira kalau fotonya akan membawa berkah



Foto: Sadewa

Sejalan dengan diselenggarakannya Seminar Nasional Agroforestri ke-5 di Universitas Pattimura, Ambon pada tanggal 20-21 November yang lalu, kami, World Agroforestry Centre (ICRAF) berkesempatan untuk mengadakan Lomba Foto Agroforestri yang dibuka untuk umum, yang dimulai sejak 25 Agustus - 30 September 2014.

Kami menerima 93 foto yang mayoritas pesertanya adalah mahasiswa dari universitas di beberapa provinsi di Indonesia. Tak kalah menariknya kami juga mengundang Pak Riza Marlon, seorang profesional fotografer untuk nature and wildlife, Ibu Tuti Herawati dari FORDA Bogor dan Pak Ronny Loppies dari Universitas Pattimura, sebagai Juri utama yang menilai para peserta lomba untuk masuk kedalam top sepuluh besar dan menjadi pemenang pertama dan kedua, sementara pemenang favorit berdasarkan voting terbanyak melalui media sosial Facebook.

Moh. Sanjiva Refi Hasibuan, seorang mahasiswa pascasarjana dari program studi Arsitektur Lanskap, Institut Pertanian Bogor, akhirnya memenangkan peringkat pertama Lomba Foto Agroforestri. Saat Refi (panggilan akrabnya) diundang



"Baduy Panen Sengon" (foto: Moh. Sanjiva Refi Hasibuan)

ICRAF untuk menerima penghargaan, tidak mengira kalau fotonya membawa keberuntungan. Pada saat kedatangannya, kamipun mendengar cerita dibalik fotonya.

"Pengambilan foto ini dilakukan saat saya sedang mengikuti praktikum dari salah satu mata kuliah di program studi Arsitektur Lanskap. Saya bersama dosen dan beberapa mahasiswa lainnya berkunjung ke kampung Baduy Dalam, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Perjalanan menuju kampung Baduy Dalam membutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 12 km. Hujan yang sangat deras sejak awal perjalanan tidak menyurutkan niat kami untuk terus berjalan menyusuri jalan tanah yang licin, naik dan turun bukit, hingga menyeberangi sungai.

Di tengah perjalanan, kami sedikit terhambat oleh aktivitas sekelompok masyarakat Baduy Luar yang sedang sibuk mengumpulkan kayu-kayu di sebuah sungai kecil dengan aliran yang

cukup deras. Mereka secara bergotong royong mulai dari anak-anak hingga wanita ikut membantu mengumpulkan kayu-kayu yang dihanyutkan dari bagian hulu. Kayu-kayu tersebut terlihat disusun dengan rapi pada bagian tepi sungai. Setelah bertanya langsung kepada masyarakat Baduy diketahui bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu Sengon yang sedang dipanen. Bibit Sengon mereka peroleh melalui bantuan pemerintah dan kemudian ditanam pada bukit-bukit yang menjadi ladang mereka. Atraksi yang sangat menarik dan langka ini langsung saya dokumentasikan dengan menggunakan kamera yang saya bawa. Pada awalnya, foto ini saya ikutsertakan pada Lomba Foto Agroforestri yang diadakan oleh ICRAF tanpa ekspektasi yang tinggi. Tapi pada akhirnya, dewan juri memutuskan foto ini menjadi yang terbaik. Alhamdulillah, potret "**Baduy Panen Sengon**" ini telah membawa keberuntungan" ujar Refi dengan tersenyum.



"Jemur kopi" (foto: Sidiq Pambudi)



"Menanam Ubi" (foto: Hendra Wijaya)

» **2015 4th International Conference on Climate Change and Humanity (ICCCH 2015)**

24-25 Januari 2015

Taipei, Taiwan

Tujuan dari Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim dan Kemanusiaan (ICCCH 2015) yang ke 4 adalah untuk menyediakan sebuah wadah bagi para peneliti, insinyur, akademisi serta industri dari seluruh dunia untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka dan kegiatan pembangunan di Perubahan Iklim dan Kemanusiaan. Konferensi Internasional ke-4 tentang Perubahan Iklim dan Kemanusiaan (ICCCH 2015) akan diselenggarakan di Taipei, Taiwan selama 24-25 Januari 2015.

Konferensi ini memberikan kesempatan bagi para delegasi untuk saling bertukar ide-ide baru dan pengalaman, untuk membangun bisnis atau penelitian dan mencari mitra global untuk kerjasama di masa depan.

Informasi lebih lanjut:

CBEES Senior Editor, Ms Lydia Liu

Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBES)

Email: iccch@cbees.org

Website: <http://www.iccch.org>» **The economics of climate change mitigation options in the forestry sector**

6-27 Februari 2015

Rome, Italy

Dalam beberapa dekade terakhir ini, minat dalam peran hutan dan hasil hutan dalam mitigasi perubahan iklim semakin meningkat. Hal ini telah menghasilkan sejumlah inisiatif seperti REDD +, pengembangan pasar untuk karbon hutan, promosi bangunan ramah lingkungan dan penggunaan kayu lainnya serta banyak kebijakan untuk mendorong pengembangan dan penggunaan bioenergi. Sementara berbagai pilihan mitigasi potensial di sektor kehutanan cukup luas, banyak negara dan daerah cenderung untuk memfokuskan pada satu atau dua pilihan dalam investasi mereka dan langkah-langkah kebijakan. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang biaya dan manfaat dari pilihan yang berbeda dan ketidakpastian tentang kelayakan penerapan berbagai langkah kebijakan. Konferensi online ini akan membahas bagaimana berbagai intervensi yang berbeda di sektor kehutanan dapat membantu untuk mengurangi perubahan iklim, berdasarkan pengalaman negara yang ada serta analisis biaya dan manfaat dari berbagai pilihan berdasarkan situasi yang berbeda.

Informasi lebih lanjut:

General enquiries

FO-CCM-CONF@fao.org

Website: <http://www.fao.org/forestry/cc-mitigation-economics/en>» **2nd International Conference on Food Security and Nutrition (ICFSN 2015)**

19 - 20 Maret 2015

Florence, Italy

Tujuan dari Konferensi Internasional Keamanan Pangan dan Gizi yang kedua (ICFSN 2015) adalah untuk menyediakan sebuah wadah bagi para peneliti, insinyur, akademisi serta profesional industri dari seluruh dunia untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka dan kegiatan pembangunan di Ketahanan Pangan dan Gizi. Konferensi Internasional tentang Keamanan Pangan dan Gizi yang kedua (ICFSN 2015) akan diselenggarakan di Florence, Italia pada tanggal 19-20 Maret 2015.

Konferensi ini memberikan kesempatan bagi para delegasi untuk bertukar ide-ide baru dan pengalaman, untuk membangun bisnis atau penelitian hubungan dan mencari mitra global untuk kerjasama di masa depan. Makalah konferensi yang diserahkan akan diperiksa oleh panitia konferensi.

Informasi lebih lanjut:

CBEES Senior Editor, Ms Sophia Du

Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBES)

Email: icfsn@cbees.net

Website: <http://www.icfsn.org>**Kuantifikasi jasa lingkungan air dan karbon pola agroforestri pada hutan rakyat di wilayah sungai Jeneberang**

M. Sjarudin, Edy Junaidi, Ary Widiyanto, Yonky Indrajaya, Ni'matul Khasanah, Lisa Tanika, Betha Lusiana, James M Roshetko



Agroforestri sebagai salah satu bentuk tutupan vegetasi yang menyerupai hutan memiliki potensi untuk mengatur tata air. Sistem agroforestri juga memiliki potensi yang lain yaitu menambat karbon melalui proses produksi biomassa. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, yang secara administratif berada di tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Sinjai, namun sebagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Bulukumba. Lokasi yang merupakan salah satu lokasi kegiatan Proyek AgFor ini juga mewakili daerah dengan tutupan lahan hutan yang masih relatif terjaga. Tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji potensi agroforestri dalam menambat karbon dan menjaga fungsi DAS. Tingkat deforestasi kawasan hutan alam di DAS Balantieng mencapai 3,9 ha/th pada kurun 1989-1999 dan 98,3 ha/tahun pada kurun 1999-2009. Sistem penggunaan lahan agroforestri Balantieng cukup berkembang, mencapai 57% dari total luas DAS Balantieng. Dengan total luasan ini, agroforestri mampu menyerap 1.481.101 ton karbon atau 76% dari cadangan karbon total di seluruh wilayah DAS Balantieng. Namun demikian perubahan penggunaan lahan secara keseluruhan di wilayah ini menyebabkan terjadinya emisi karbon sebesar 20.164 ton CO₂-eq/th pada kurun waktu 1989-1999 dan 136.193 ton CO₂-eq/th pada kurun waktu 1999-2009.

Pedoman Budi Daya Durian dan Rambutan di Kebun Campur

Sobir and Endri Martini



Buku saku ini merupakan kumpulan hasil penelitian Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB, Bogor.

Buku ini disusun dalam rangka kegiatan Sekolah Lapang AgFor Sulawesi yang diadakan pada bulan Februari 2014 di Sulawesi Selatan, dengan Bapak Sobir sebagai narasumbernya.

A new trend in palm oil production in the context of changing global demands: a portrayal of oil palm development in Riau Province, Sumatra, Indonesia

Suseno Budidarsono, Martua T Sirait and Ujjwal Pradhan

- Ekspansi luas perkebunan kelapa sawit oleh petani independen, ditambah dengan munculnya aktor-aktor swasta baru (yang beroperasi di dalam lahan seluas beberapa ratus hektar) jelas berkontribusi terhadap masalah lingkungan lintas batas.



- Pengembangan perbatasan menjadikan semuanya di luar kontrol Pemerintah Indonesia, sehingga banyak kasus dari daerah-daerah tersebut yang tidak dilanjutkan pengelolaannya, dan melanggar prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.
- Observasi lapangan menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit oleh masyarakat independen, termasuk petani, melibatkan pengalihan tanah besar-besaran. Masyarakat lokal memainkan peran penting memfasilitasi perluasan perkebunan kelapa sawit di daerah-daerah
- Dari perspektif Negara, petani kelapa sawit mandiri, yang sebagian besar termasuk dalam data resmi, harus dilihat sebagai aktor utama dalam pengelolaan lanskap.

Koleksi publikasi dapat di akses melalui:

www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia/publications**Informasi lebih lanjut:**

Melinda Firds (Amel)

Telp: (0251) 8625415 ext. 756; Fax: (0251) 8625416

email: icrafseapub@cgiar.org